

Kerajaan Allah sebagai Konsep Sentral Teologi Perjanjian Lama: Kajian Biblikal atas Relasi Perjanjian, Keadilan, dan Kesetiaan

Yoas Tanugraha*, Ruben Nesimnasi
Sekolah Tinggi Theologi "IKAT", Indonesia
*adaituu2025@gmail.com

Abstract

The Kingdom of God is a central concept that unifies the theological structure of the Old Testament (OT), spanning from God's cosmic sovereignty to the eschatological direction of salvation history. This study aims to analyze the Kingdom of God as an integral theological paradigm by tracing the ontological foundations of God's reign, the relational mode through covenant (Ex 19:5-6; 2 Sam 7:12-16), and the ethical foundations of justice and faithfulness (Ps 97:2; Isa 11:3-5). Using a qualitative-theological method with historical-grammatical exegesis and canonical hermeneutics, this study examines key OT texts to map out a consistent and interrelated structure of the kingdom. The results show that the Kingdom of God functions as the axis of Old Testament theology: cosmic sovereignty establishes the basis of divine government, the covenant provides a relational framework for the life of the people, and justice and faithfulness become the norms of the kingdom that shape the historical praxis of Israel. The eschatological dimension reveals the direction of the kingdom toward universality and eternity (Isa 2:2-4; Dan 7:14; Zech 14:9). This study also affirms a natural continuity with the New Testament, where Jesus' proclamation that "the Kingdom of God is at hand" (Mark 1:15) appears as the fulfillment of the kingdom structure that had been built in the Old Testament. The main contribution of this study lies in the formulation of the kingdom paradigm as a hermeneutical framework that helps to read the theological unity of the Old and New Testaments, as well as enriching the study of Old Testament theology through the integration of ontological, covenantal, ethical, and eschatological dimensions. These findings open up space for further research on the ethical, ecclesiological, and missionary implications of the Kingdom of God in the life of the people.

Keywords: *The Kingdom of God; Old Testament Theology; Covenant; Justice; Canonical Hermeneutics*

Abstrak

Kerajaan Allah merupakan konsep sentral yang mempersatukan struktur teologi Perjanjian Lama (PL), membentang dari kedaulatan kosmik Allah hingga arah eskatologis sejarah keselamatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis Kerajaan Allah sebagai paradigma teologis integral dengan menelusuri fondasi ontologis pemerintahan Allah, modus relasional melalui perjanjian (Kel 19:5-6; 2Sam 7:12-16), serta tumpuan etis berupa keadilan dan kesetiaan (Mzm 97:2; Yes 11:3-5). Menggunakan metode kualitatif-teologis dengan eksgeesis historis-gramatikal dan hermeneutika kanonis, penelitian ini menelaah teks-teks kunci PL untuk memetakan struktur kerajaan yang konsisten dan saling terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerajaan Allah berfungsi sebagai poros teologi PL: kedaulatan kosmik menegakkan dasar pemerintahan ilahi, perjanjian menyediakan kerangka relasional bagi kehidupan umat, dan keadilan serta kesetiaan menjadi norma kerajaan yang membentuk praksis historis Israel. Dimensi eskatologis memperlihatkan arah pemerintahan menuju universalitas dan kekekalan (Yes 2:2-4; Dan 7:14; Za 14:9). Penelitian ini juga menegaskan kesinambungan natural dengan

Perjanjian Baru, di mana perwartaan Yesus bahwa “Kerajaan Allah sudah dekat” (Mrk 1:15) tampil sebagai penggenapan atas struktur kerajaan yang telah dibangun dalam PL. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan paradigma kerajaan sebagai kerangka hermeneutik yang membantu membaca kesatuan teologis PL-PB, serta memperkaya kajian teologi PL melalui integrasi dimensi ontologis, perjanjian, etis, dan eskatologis. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai implikasi etis, eklesiologis, dan misioner Kerajaan Allah dalam kehidupan umat.

Kata Kunci: Kerajaan Allah; Teologi Perjanjian Lama; Perjanjian; Keadilan; Hermeneutika Kanonis

Pendahuluan

Kajian teologi Perjanjian Lama (PL) berupaya menelusuri bagaimana Allah menyatakan diri-Nya dalam sejarah Israel melalui tindakan, firman, dan relasi perjanjian. Penyataan tersebut membentuk pola naratif yang konsisten sejak penciptaan hingga nubuat para nabi. Dalam keseluruhan narasi itu, tema Kerajaan Allah menempati posisi fundamental sebagai horizon tempat identitas umat, hukum, ibadah, dan sejarah keselamatan dipahami. Penempatan ini selaras dengan pandangan bahwa malkuth YHWH merupakan kerangka konseptual yang menghubungkan berbagai tradisi dan genre dalam PL, sehingga pembacaan terhadap teks-teks PL perlu diarahkan untuk melihatnya di bawah pemerintahan Allah yang berdaulat dan memerintah dalam kasih setia (Selman, 1989; Peels, 2001). Melalui teks-teks seperti Mazmur 93:1-2 dan Mazmur 103:19 diperlihatkan bahwa Allah telah dinyatakan sebagai Raja atas seluruh ciptaan sejak permulaan (Hamilton, 2023; Stewart, 2002), sehingga kedaulatan-Nya tidak dapat direduksi menjadi konsep politis yang terbatas pada Israel (Situmorang & Marulitua, 2002).

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai Kerajaan Allah dalam PL masih menunjukkan adanya ruang kosong. Sejumlah penelitian berfokus pada satu aspek tertentu, misalnya fondasi ontologis kerajaan yang dikemukakan oleh Miller, (1984), struktur perjanjian oleh Umaru (2025) dan Ko (2018), atau visi profetik mengenai keadilan dan kesetiaan dalam Ademiluka (2017) dan Manurung (2021), namun belum banyak yang menyusun analisis integratif yang mengaitkan seluruh aspek tersebut secara menyeluruh. Dengan kata lain, masih kurang penelitian yang secara sistematis menghubungkan (1) kedaulatan kosmik Allah, (2) relasi perjanjian sebagai modus pemerintahan ilahi, (3) dimensi moral berupa keadilan dan kesetiaan sebagai tumpuan takhta (Mzm 97:2), dan (4) horizon eskatologis mengenai pemerintahan Allah yang universal dan kekal (Yes 2:2-4; Dan 7:14; Za 14:9) menjadi satu kerangka teologi PL yang saling menerangi. Kekosongan inilah yang menjadi dasar kebutuhan akademik yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Meskipun dimensi etis dan eskatologis merupakan bagian integral dari Kerajaan Allah, sebagaimana tergambar dalam tegasan profetik tentang pemerintahan Mesias yang adil (Yes 11:3-5) dan visi damai universal pada akhir zaman (Menn, 2013; Ferguson, 2020). Analisis mendalam mengenai kedua aspek tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dalam bagian pembahasan. Pada tahap pendahuluan ini, fokus diarahkan pada penyusunan kerangka teoretis awal serta identifikasi kesenjangan penelitian, sehingga struktur artikel tetap proporsional dan tujuan akademiknya terlihat jelas.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) merumuskan struktur teologis Kerajaan Allah dalam PL melalui empat poros utama, yaitu fondasi ontologis, relasi perjanjian, dimensi etis, dan arah eskatologis; (2) menelusuri keterkaitan keempat poros tersebut dalam menyusun kesatuan naratif Kerajaan Allah; dan (3)

menunjukkan kontribusinya terhadap pemahaman kesinambungan Kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam terang pewartaan Yesus bahwa “Kerajaan Allah sudah dekat” (Mrk 1:15) sebagai penggenapan struktur teologis yang telah dibangun dalam PL (Goldsworthy, 1991; Shaw, 2018). Dengan menyusun analisis secara terpadu, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian teologi PL dan memberikan kerangka hermeneutis yang lebih komprehensif bagi pembacaan Alkitab secara keseluruhan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-teologis dalam bentuk studi biblika yang berfokus pada analisis sistematis terhadap teks-teks Perjanjian Lama yang memuat konsep Kerajaan Allah, terutama Mazmur 93 dan 103, Keluaran 19, 2 Samuel 7, Yesaya 11, Daniel 7, dan Zakharia 14, yang dipilih karena merepresentasikan poros-poros teologis utama kerajaan dalam PL. Seluruh teks tersebut dianalisis menggunakan exegesis historis-gramatikal untuk menelusuri makna asli dalam konteks literer dan historisnya, kemudian dibaca secara hermeneutis melalui pendekatan kanonis-tematik guna mengidentifikasi pola perkembangan, konsistensi tematik, dan hubungan antarteks dalam keseluruhan korpus PL serta keterikatannya dengan gambaran kerajaan dalam PB. Pendekatan ganda ini memungkinkan penelitian melakukan pembacaan mikro pada teks individual dan pembacaan makro pada struktur tematik kanonis tanpa mencampurkan tahap metodologis dengan argumentasi teologis, sehingga metode tetap teknis dan operasional sesuai standar penelitian kualitatif-teologis. Untuk menjaga validitas interpretatif, penelitian ini menerapkan triangulasi literatur dengan membandingkan hasil analisis dengan kontribusi para ahli teologi biblika, sehingga temuan yang dihasilkan tidak hanya konsisten secara hermeneutis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam percakapan akademik yang lebih luas.

Hasil dan Pembahasan

1. Struktur Teologis Kerajaan Allah dalam Perjanjian Lama

a. Kerajaan Allah sebagai konsep sentral teologi Perjanjian Lama

Kerajaan Allah ditempatkan sebagai “*basic and even central notion*”, sehingga seluruh pembacaan teologis diarahkan untuk melihat bagaimana pemerintahan ilahi membentang dari awal narasi hingga sisi-sisi profetisnya (Peels, 2001). Penegasan ini penting untuk menghindari fragmentasi pembacaan PL sebagai kumpulan tema terpisah, dan sebaliknya menempatkannya dalam satu benang merah teologis yang mengikat keseluruhan kisah, yakni pemerintahan Allah (Peels, 2001; Selman, 1989). Istilah Ibrani malkuth YHWH menegaskan bahwa yang dibicarakan bukan sekadar institusi politis, tetapi realitas pemerintahan Allah yang aktif dan efektif (Coetsee, 2019). Dengan demikian, berbagai tradisi dan genre PL, yaitu narasi penciptaan, sejarah perjanjian, korpus hukum, dan nubuat dikembalikan pada pusat gravitasi teologis yang sama: Allah yang memerintah (Selman, 1989).

Penekanan ini menghasilkan implikasi hermeneutis yang penting. Evaluasi teologis terhadap tindakan Allah dan respons umat ditempatkan dalam kerangka kerajaan: perintah dilihat sebagai ekspresi otoritas Raja, ketaatan dimaknai sebagai kesetiaan warga kerajaan, dan keadilan dibaca sebagai tumpuan takhta-Nya. Dengan demikian, pembacaan PL terhindar dari moralisisme atau politisasi sempit, sebab seluruh dimensi etis dan sosial dikaitkan langsung dengan karakter Raja yang benar dan setia. Sentralitas kerajaan ini juga menghubungkan PL dan PB sebagai satu garis pewahyuan: konsep Kerajaan Allah dalam PB hanya dapat dipahami dengan tepat apabila pembacaan terlebih dahulu mengenali struktur teologi kerajaan yang telah dibangun dalam PL.

b. Allah Sebagai Raja Atas Seluruh Ciptaan

Penegasan bahwa Allah adalah Raja atas seluruh ciptaan berakar pada teks-teks seperti Mazmur 93:1-2 dan Mazmur 103:19, yang menggambarkan pemerintahan Allah sebagai realitas ilahi yang mendahului sejarah dan melampaui batas-batas manusia (Stewart, 2002). Ungkapan tentang takhta yang “tegak sejak dahulu kala” dan kerajaan yang “berkuasa atas segala sesuatu” menunjukkan cakupan kedaulatan yang universal dan durasi pemerintahan yang kekal (Peels, 2001). Pembacaan literer atas Mazmur 93, misalnya, memperlihatkan gambaran liturgis tentang Allah yang berkuasa atas kekacauan kosmik, sehingga kedaulatan-Nya tidak pernah bergantung pada struktur manusia. Sementara itu, Mazmur 103 menegaskan kerajaan universal yang mencakup seluruh ciptaan, sehingga identitas Israel sebagai umat pilihan bukanlah batas kedaulatan, tetapi sarana manifestasi kedaulatan tersebut (Gerstenberger, 1971; Situmorang & Marulitua, 2002). Dari dasar kosmik itu muncul konsekuensi etik-teologis. Karena Allah adalah Raja atas seluruh ciptaan, maka seluruh realitas, yaitu ibadah, hukum, relasi sosial, dan kehidupan komunal, dibaca secara teosentrisk, menurut karakter Sang Raja (Brueggemann, 1991). Mandat-mandat hukum dan nubuat pun dipahami sebagai ekspresi dari karakter Raja yang adil dan setia, bukan tuntutan arbitrer (Miller, 1984). Dengan demikian, natur kerajaan yang universal menyediakan kerangka bagi relasi Allah dengan Israel: kedaulatan universal tidak dibatasi oleh hubungan perjanjian, tetapi justru dikonkretkan melalui umat yang dipanggil untuk memperlihatkan pemerintahan Allah dalam sejarah.

c. Pemerintahan Allah Dijalankan Melalui Perjanjian

Modus pemerintahan kosmik Allah di bumi dijalankan melalui perjanjian, yang terejawantahkan dalam dua poros utama: Keluaran 19:5-6 dan 2 Samuel 7:12-16. Keluaran 19:5-6 menempatkan Israel sebagai “kerajaan imam dan bangsa yang kudus”, menandakan bahwa pemerintahan Allah diperantarai oleh relasi perjanjian yang memadukan komitmen kekudusan dengan panggilan representasi. Dalam perspektif ini, ketiaatan tidak dipahami sebagai legalisme, tetapi sebagai kesetiaan warga kerajaan yang mengafirmasi identitasnya sebagai umat milik Allah. Poros kedua, 2 Samuel 7:12-16, menegaskan dimensi historis pemerintahan Allah melalui janji takhta yang “kokoh untuk selamanya”. Janji ini memperlihatkan bahwa pemerintahan ilahi tidak hanya ditopang oleh relasi perjanjian, tetapi juga diarahkan pada penggenapan Mesianik sebagai bentuk konkret penegakan kerajaan Allah di bumi. Dengan demikian, perjanjian Sinai dan janji takhta menyatu sebagai logika internal yang utuh: Sinai memberi tatanan etik dan kultis sebagai ciri warga kerajaan; janji takhta menyediakan arah historis mengenai bagaimana pemerintahan Allah ditegakkan secara berkelanjutan (Mendrofa, 2022).

Korelasi antara perjanjian dan kerajaan ini menegaskan mengapa dimensi etis menempati posisi fundamental (Kobstan & Tjitojo, 2024). Karena pemerintahan Allah dijalankan melalui perjanjian, maka keadilan dan kesetiaan menjadi standar yang melekat pada takhta Allah dan cara umat merespons-Nya (Siahaan et al., 2022). Perjanjian berfungsi bukan hanya sebagai kerangka hukum, tetapi sebagai struktur relasional yang menghubungkan kedaulatan kosmik dengan kehidupan umat. Harapan tentang kerajaan yang tegak dan kekal mencegah umat jatuh pada dua ekstrem: bergantung pada kekuatan manusia atau menghindari tanggung jawab etis. Di bawah perjanjian, umat dipanggil untuk hidup kudus dan adil sekarang, sambil menantikan penegakan penuh pemerintahan Allah sesuai janji-Nya.

2. Dimensi Moral dan Eskatologis Pemerintahan Allah

a. Landasan Etis Keadilan dan Kesetiaan

Pemerintahan Allah bersifat moralis, artinya kedaulatan ilahi tidak dipahami semata-mata sebagai kuasa atas ruang dan waktu, tetapi sebagai otoritas yang berakar pada karakter Allah sendiri (Hwang, 2023). Mazmur 97:2 menjadi teks kunci: “Keadilan

dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya”, yang menegaskan bahwa takhta ditopang bukan oleh perangkat legal yang netral, melainkan oleh kebenaran moral yang mencerminkan siapa Allah itu. Karena itu, pembahasan mengenai kerajaan dalam PL harus bergerak dari klaim ontologis menuju konsekuensi etis mengenai bagaimana pemerintahan Allah dijalankan secara benar. Dua konsep Ibrani, yaitu tsedaqah/mishpat (keadilan) dan ‘emunah (kesetiaan) memberikan horizon etik yang khas: keadilan adalah tatanan benar yang menata kehidupan umat sesuai kehendak Sang Raja (Manurung, 2021). Aementara kesetiaan menunjuk pada konsistensi komitmen yang menuntut respons umat dalam bentuk integritas (Mite, 2024). Kedua konsep ini membentuk poros ganda, yaitu tatanan sosial dan relasi perjanjian yang menjadikan kerajaan bukan hanya keberlakuan kuasa, tetapi kehadiran karakter Allah dalam ruang sosial.

Penegasan etis ini memperoleh bentuk naratif-prophetik dalam Yesaya 11:3-5, yang menggambarkan seorang yang diurapi menghakimi “orang lemah dengan keadilan”. Untuk memperjelas pembacaan, konteks historisnya perlu diangkat: nubuat ini lahir dalam situasi Yehuda pasca-Uzia-Ahas, ketika praktik hukum sarat dengan suap, ketidakjujuran, dan eksploitasi ekonomi. Karena itu, kritik Yesaya terhadap penghakiman berdasarkan “penglihatan mata dan pendengaran telinga” bukan sekadar koreksi abstrak, tetapi respons terhadap situasi sosial Israel kuno yang ditandai oleh ketimpangan struktural, favoritisme elite, dan lemahnya perlindungan bagi kaum rentan (Waoma & Moimau, 2024). Dengan demikian, etika kerajaan di dalam nubuat ini memperlihatkan bahwa standar ilahi berpihak pada kebenaran dan khususnya pada mereka yang tertindas, bukan karena relativisme moral, tetapi karena karakter Allah sendiri yang adil dan setia.

Implikasi etis ini menyentuh dimensi pembentukan umat. Ketaatan hukum tidak sekadar kepatuhan legalistik, tetapi partisipasi etis dalam pemerintahan Allah; ibadah tidak dapat dipisahkan dari keadilan; dan kepemimpinan harus mencerminkan karakter Sang Raja. Tradisi profetik menegaskan bahwa ketidakadilan struktural adalah pelanggaran terhadap karakter Tuhan dan karena itu mendatangkan penghakiman (Lukmono & Praditya, 2025). Dalam konteks sosial Israel kuno, perlakuan terhadap orang miskin, janda, yatim, dan pendatang menjadi indikator kualitas etika kerajaan (Panjaitan & Olivia, 2023). Maka, “tumpuan takhta” (Mzm 97:2) memberi bahasa arsitektural yang kuat: tanpa keadilan dan hukum, takhta runtuh. Norma kerajaan sekaligus menjadi modus kehadiran Allah; ketika umat taat, kerajaan hadir sebagai shalom dalam komunitas, tetapi ketika diabaikan, krisis legitimasi menuntut koreksi profetik.

b. Pemerintahan Allah: Kekekalan, Universalitas, dan Puncak Damai

Tiga teks kunci, Yesaya 2:2-4, Daniel 7:14, dan Zakharia 14:9 membentuk pola eskatologi kerajaan yang menyoroti universalisasi pemerintahan, kekekalan kuasa, dan terwujudnya damai ilahi (Rangin et al., 2025). Yesaya 2:2-4 menampilkan bangsa-bangsa yang “berduyun-duyun” menuju gunung Tuhan, sebuah gambaran yang menandakan daya tarik etis dari pemerintahan Allah. Transformasi pedang menjadi mata bajak memperlihatkan bahwa damai bukan sekadar absennya konflik, tetapi pembaruan radikal orientasi bangsa-bangsa melalui pengajaran Tuhan. Pemadatan ini menegaskan inti pesan teks: pemerintahan Allah menghasilkan tatanan damai yang lahir dari transformasi etis dan sosial, bukan dari dominasi militer.

Daniel 7:14 menambahkan karakter kekekalan: pemerintahan ilahi tidak tunduk pada fragilitas politik manusia, tetapi tegak dalam kekuatan yang tak terbinaskan. Teks ini memperlihatkan bahwa eskatologi kerajaan tidak bersifat utopis atau rapuh; pemerintahan yang dijanjikan bersifat permanen. Sementara itu, Zakharia 14:9 menampilkan puncak universalitas kerajaan: “TUHAN akan menjadi Raja atas seluruh bumi”, Rumusan “satu-satunya” menegaskan eksklusivitas penyembahan sebagai penutup dari pluralitas religius dan ambiguitas politik. Dengan demikian, universalisasi

kerajaan tidak hanya mencakup otoritas, tetapi juga pengakuan umat. Ketiga teks ini, bila dibaca bersama landasan etis sebelumnya, menampilkan garis teleologis yang ringkas namun kuat. Keadilan dan kesetiaan menjadi pra-figurasi dari tatanan akhir; damai eskatologis merupakan pembaruan sejarah, bukan pelarian darinya; kekekalan kuasa memastikan bahwa pembaruan tidak mengalami regresi; dan universalitas kerajaan memperlihatkan bahwa relasi perjanjian Israel diarahkan pada cakupan kosmik. Implikasi teologisnya ialah bahwa tindakan keadilan dan kesetiaan pada masa kini merupakan partisipasi dalam tatanan eskatologis; misi umat bersifat kesaksian terhadap karakter kerajaan; ibadah ditarik dari kecenderungan privatistik menuju tanggung jawab sosial; dan pengharapan dibebaskan dari fatalisme maupun triumphalisme. Dengan demikian, eskatologi kerajaan menegaskan bahwa pemerintahan Allah bergerak dari fondasi moral menuju puncak damai universal dan kekal, dan bahwa umat dipanggil untuk menghidupi keadilan dan kesetiaan sebagai tanda kehadiran kerajaan sambil menantikan kepenuhannya ketika Allah diakui sebagai Raja atas seluruh bumi.

3. Kesinambungan Kerajaan Allah dalam Wahyu Perjanjian Baru

a. Kerajaan Allah sebagai dasar pewartaan Yesus dalam Perjanjian Baru

Pemberitaan Yesus, “Kerajaan Allah sudah dekat” (Mrk 1:15), tidak diposisikan sebagai pengenalan konsep baru, melainkan sebagai penggenapan dari seluruh horizon Kerajaan yang telah dibentangkan oleh Perjanjian Lama. Dengan demikian, hubungan PL-PB ditata bukan melalui pergantian tema, tetapi melalui kesinambungan: segala yang dinyatakan di PL tentang pemerintahan Allah baik dalam bentuk pengakuan kosmik (Mzm 93:1-2; 103:19), tatanan etis (Mzm 97:2; Yes 11:3-5), maupun arah eskatologis (Yes 2:2-4; Dan 7:14; Za 14:9) dihadirkan kembali dalam PB sebagai realitas yang mendekat, yang meminta respons pertobatan dan iman. Dengan peletakan seperti itu, pewartaan Yesus dipahami sebagai titik konsentrasi dari janji-janji kerajaan yang sebelumnya telah menembus narasi PL.

Untuk memperkuat kesinambungan tersebut secara biblikal, pola intertekstual antara visi kerajaan PL dan deklarasi Yesus dalam Mrk 1:15 perlu disoroti. Secara literer, Markus membuka pelayanan Yesus dengan formula profetis, “genaplah waktunya” yang merefleksikan bahasa penggenapan nubuat PL. Selain itu, penggunaan istilah *basileia tou theou* dalam Markus beresonansi langsung dengan konsep pemerintahan YHWH dalam PL, terutama pada teks-teks yang menggambarkan Allah hadir sebagai Raja yang menata keadilan dan memulihkan umat. Dengan demikian, pernyataan Yesus bukan hanya melanjutkan gagasan PL, tetapi juga mengintensifikannya melalui pola nubuatan-penggenapan yang khas injili.

Kontinuitas tersebut membuat warta Yesus terbaca dalam bahasa dan imajinasi teologis yang sudah akrab bagi pembaca PL. Ketika kedekatan Kerajaan Allah diumumkan, yang dibayangkan bukan sekadar munculnya domain kekuasaan baru, melainkan kedatangan pemerintahan ilahi yang telah lama dijanjikan: suatu pemerintahan yang bertumpu pada keadilan dan hukum (Mzm 97:2), memihak yang lemah (Yes 11:3-5), bersifat kekal dan tidak terbinaskan (Dan 7:14), serta meliputi seluruh bumi (Za 14:9). Karena itu, warta Injil tidak memerlukan landasan baru di luar PL; fondasi teologisnya telah dipersiapkan oleh kesaksian PL tentang siapa Allah sebagai Raja dan bagaimana pemerintahannya beroperasi.

Implikasi hermeneutik dari relasi ini bersifat langsung. Pertama, pemahaman PB tentang Kerajaan Allah tidak dapat diputus dari bahasa perjanjian PL (Kel 19:5-6). Bila Israel disebut “kerajaan imam dan bangsa kudus”, maka pewartaan Kerajaan Allah dalam PB harus terbaca sebagai pemanggilan kembali umat kepada identitas dan panggilan itu yakni hidup di bawah pemerintahan Allah dalam kekudusan dan kesaksian. Kedua,

bahasa kedekatan (Mrk 1:15) tidak dimengerti sebagai peniadaan sejarah PL, melainkan sebagai pengintensifan makna PL: apa yang dulu diwartakan nabi sebagai janji dan visi, kini diketengahkan sebagai realitas yang mendesak untuk direspon. Ketiga, struktur etis PL, yaitu keadilan dan kesetiaan tidak didegradasi, tetapi justru dihadirkan sebagai norma kerajaan yang menyertai pewartaan Injil. Dengan demikian, PB menghadirkan kesinambungan yang bukan hanya konseptual, tetapi juga praktis: cara hidup umat tetap dibingkai oleh karakter pemerintahan Allah sebagaimana telah ditata di PL.

Keterhubungan itu sekaligus memperlihatkan bahwa warta Yesus berakar pada daya tahan firman. Hal ini mengingatkan bahwa firman Tuhan tetap selama-lamanya (Yes 40:8) dan bahwa perkataan Kristus tidak akan berlalu (Mat 24:35). Keduanya memberi jembatan teologis: kesaksian PL tentang ketetapan firman memancarkan dasar keandalan yang sama dengan ketetapan perkataan Kristus; karenanya, peralihan dari PL ke PB bukan peralihan dari yang sementara ke yang baru sama sekali, melainkan dari firman yang tetap ke perkataan yang menggenapi. Di titik ini, pewartaan Kerajaan Allah oleh Yesus dapat dibaca sebagai konvergensi antara stabilitas firman (PL) dan kedekatan realisasi (PB). Dalam kerangka ini, pernyataan bahwa Yesus tidak memperkenalkan ide baru berfungsi sebagai koreksi metodologis. PB tidak boleh dibaca sebagai pemutusan identitas iman Israel, tetapi sebagai pelunakan simpul dari benang merah yang telah ditarik sejak awal. Karena itu, gagasan Kerajaan Allah menjadi pintu masuk yang paling logis untuk memahami kesinambungan PL-PB: di PL dinyatakan siapa yang memerintah dan bagaimana pemerintahan itu bekerja; di PB dinyatakan kedekatan dan cara merespons pemerintahan itu.

b. Kesatuan Naratif Dari Penciptaan Hingga Penggenapan

Alkitab menempatkan Kerajaan Allah sebagai benang merah yang menyatu dari awal hingga akhir narasi PL, lalu melintasi batas kanon ke PB. Fokus kesatuan itu telah diringkas dalam butir kesimpulan: Kerajaan Allah adalah (1) dasar penciptaan; (2) inti perjanjian Allah dengan umat-Nya; (3) landasan etika ilahi berupa keadilan dan kesetiaan; (4) tujuan eskatologis sejarah keselamatan; dan (5) fondasi teologi Kerajaan dalam PB. Dengan urutan ini, sebuah arsitektur naratif-teologis disediakan: dari penciptaan (Allah sebagai Raja), melalui perjanjian (relasi pemerintahan), menuju etika kerajaan (keadilan-kesetiaan), hingga eskaton (pemerintahan universal-kekal), dan masuk ke PB (pemberitaan dan penggenapan). Pada bagian ini pola naratif PL diperlihatkan bekerja sebagai bingkai yang konsisten: universalitas (penciptaan), partikularitas (perjanjian), normativitas (keadilan), dan universalisasi kembali (eskaton). Ketika PB, melalui Mrk 1:15, mengambil alih bahasa penggenapan, elemen-elemen ini tidak diganti tetapi dialihkan ke fase realisasi.

Pada tingkat awal, pengakuan bahwa Allah adalah Raja atas seluruh ciptaan (Mzm 93:1-2; 103:19) memberi basis untuk menyatukan seluruh tema. Karena kerajaan Allah didasarkan pada kedaulatan kosmik, hubungan Allah dengan Israel tidak dapat dibaca sebagai pengecilan cakupan kerajaan, melainkan sebagai modus konkret pemerintahan itu di sejarah. Di sini, perjanjian (Kel 19:5-6) berfungsi sebagai simpul naratif yang menjembatani keuniversalan kerajaan dengan kehistorisan pengalaman umat: Israel ditetapkan sebagai kerajaan imam agar kehadiran Raja kosmik dapat ditunjukkan secara kasat mata melalui identitas, ibadah, dan hukum umat. Dengan demikian, penciptaan (universalitas) dan perjanjian (partikularitas) tidak dipertentangkan, melainkan disatukan: kerajaan yang menyeluruh itu mengambil bentuk dalam komunitas yang dipanggil secara khusus.

Kerangka ini menuntun ke pengertian etis. Ketika keadilan dan hukum disebut sebagai tumpuan takhta (Mzm 97:2), relasi perjanjian memperoleh isi normatif; umat tidak sekadar diikat, tetapi ditata oleh standar kerajaan. Penglihatan tentang pemerintahan

yang memihak yang lemah (Yes 11:3-5) memperlihatkan bahwa etika tersebut tidak bersifat netral; keadilan kerajaan hadir sebagai koreksi terhadap bias, penindasan, dan manipulasi, serta sebagai dukungan terhadap mereka yang rentan. Di titik ini, narasi kerajaan tidak hanya menunjuk siapa yang memerintah (Allah) dan bagaimana pemerintahan dijalankan (melalui perjanjian), tetapi juga apa yang menjadi karakter pemerintahan (keadilan-kesetiaan). Semua ini membentuk alur tengah dari kisah PL.

Visi damai universal (Yes 2:2-4), ketetapan pemerintahan yang kekal (Dan 7:14), serta pengakuan universal atas YHWH (Za 14:9) menunjukkan bahwa narasi kerajaan tidak berakhir pada tatanan partikular ia bergerak menuju puncak di mana pemerintahan Allah diakui secara universal dan damai dikerjakan sebagai tatanan publik. Dengan demikian, struktur naratif PL dipahami sebagai busur yang diarahkan ke masa depan: sejak penciptaan sampai perjanjian dan etika, semua unsur diorientasikan pada kepuaan. PB, ketika mengumandangkan bahwa kerajaan sudah dekat (Mrk 1:15), masuk sebagai fase konvergensi dari busur itu yakni masa ketika pengharapan yang disebut PL mulai menyentuh realitas historis secara intensif.

Kerajaan Allah menjadi fondasi bagi teologi Kerajaan dalam PB menghasilkan satu simpulan naratif: PL dan PB membentuk kesatuan organik dengan Kerajaan Allah sebagai pemersatu. Dalam kesatuan ini, peralihan testamental tidak dimaknai sebagai pergantian pemerintahan, tetapi sebagai pemajuan: apa yang menjadi tema besar PL ditarik ke dalam warta dan karya di PB. Karena itu, apabila Kerajaan Allah di PL menyusun struktur kosmologis, perjanjian, dan etika, maka PB menjadi tempat di mana struktur itu diserukan kembali sebagai panggilan mendesak sebab kerajaan yang sama, dengan karakter yang sama, kini mendekat (Gidion, 2017). Alur seperti inilah yang memungkinkan narasi keselamatan terbaca utuh: dari penciptaan (Allah Raja) menuju penggenapan (Allah diakui Raja atas seluruh bumi) (Panggarra, 2013).

c. Kontribusi Teologis Bagi Pembacaan PL-PB Secara Utuh

Fungsi paradigmatis Kerajaan Allah bagi seluruh pembacaan Alkitab. Paling tidak, tiga kontribusi teologis dapat ditarik dari sana, dan ketiganya bersumber langsung dari rangkaian argumentasi yang telah disajikan. Pertama, kontribusi struktur teologis. Kerajaan Allah memberikan kerangka baca yang menyatukan tema-tema PL dan menjembatani PL-PB (Gidion, 2017). Tanpa paradigma kerajaan, tema perjanjian, hukum, ibadah, nubuat, dan eskatologi mudah terlepas satu sama lain. Dengan paradigma kerajaan, semua tema itu diposisikan sebagai fungsi dari pemerintahan Allah: perjanjian sebagai modus pemerintahan, hukum sebagai tatanan kerajaan, ibadah sebagai pengakuan akan Raja, nubuat sebagai seruan korektif dan pengharapan kerajaan, dan eskatologi sebagai puncak pemerintahan. Pola inilah yang membuat pembacaan PL tidak jatuh pada fragmentasi, sekaligus menyiapkan pembaca untuk memahami pewartaan PB yang menggunakan bahasa kerajaan sebagai poros.

Kedua, kontribusi etis-prophetik. Karena takhta bertumpu pada keadilan dan hukum (Mzm 97:2), serta karakter pemerintahan berpihak pada yang lemah (Yes 11:3-5), paradigma kerajaan menghadirkan norma evaluasi terhadap hidup umat. Di sini, kontribusi Kerajaan Allah tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan masuk ke ranah praksis: liturgi dan moralitas disatukan; aneka bentuk ketidakadilan (eksploitasi, penindasan, ketimpangan) dikritik sebagai kontradiksi terhadap takhta; dan panggilan kesetiaan dinyatakan sebagai respon perjanjian. Dengan demikian, baik PL maupun PB memperoleh penopang etis yang sama: kebenaran ilahi yang wajib dihidupi warga kerajaan. Paradigma ini menjaga pembacaan PB dari dua ekstrem yakni spiritualisasi yang mengabaikan keadilan, dan moralitas kosong yang terlepas dari pengakuan terhadap pemerintahan Allah.

Ketiga, kontribusi eskatologis-misioner. Karena arah Kerajaan Allah ditegaskan universal dan kekal (Yes 2:2-4; Dan 7:14; Za 14:9), paradigma kerajaan memperluas cakrawala pembacaan dari komunitas partikular menuju horizon bangsa-bangsa. Kontribusi ini menyentuh pembacaan PB secara langsung: bila kerajaan sudah dekat, maka gereja dipanggil untuk menjadi saksi dari tatanan kerajaan itu yakni keadilan, kesetiaan, dan damai di tengah publik. Dengan bahasa teologis, kesaksian seperti itu tidak merupakan penemuan baru, melainkan kelanjutan dari panggilan lama Israel sebagai “kerajaan imam dan bangsa kudus” (Kel 19:6). Dengan kata lain, paradigma kerajaan bukan saja menyatukan PL-PB secara konseptual, melainkan juga memfokuskan tugas umat lintas perjanjian: menghadirkan wajah pemerintahan Allah dalam sejarah hingga pengakuan universal atas YHWH ditegakkan.

Seluruh narasi Perjanjian Lama menyingkapkan satu tema besar: Allah yang memerintah dalam kasih dan kebenaran, memulihkan dunia di bawah kerajaan-Nya yang kekal (Sihombing et al., 2023). Pernyataan ini tidak sekadar menutup presentasi, melainkan mengembalikan pembaca kepada fungsi hermeneutik Kerajaan Allah: pembacaan Alkitab diarahkan untuk melihat siapa Allah (Raja), bagaimana Ia memerintah (melalui perjanjian, dengan keadilan-kesetiaan), dan ke mana sejarah diarahkan (damai universal, kekuasaan kekal, pengakuan tunggal atas nama-Nya). Ketika PB mengumandangkan kedekatan kerajaan, yang diminta adalah penerimaan dan ketiaatan terhadap pola yang telah disediakan oleh PL. Dengan begitu, kesatuan PL-PB tidak dibuat oleh spekulasi teologis, melainkan oleh benang merah kerajaan itu sendiri.

Sebagai catatan penutup subbagian, perlu ditekankan bahwa seluruh kontinuitas ini berdiri di atas ketetapan firman (Yes 40:8; Mat 24:35). Kesetiaan firman menjamin bahwa struktur kerajaan yang dihamparkan PL tidak akan berlalu, sehingga ketika PB hadir dengan warta kedekatan, yang terjadi bukan penggantian dasar, melainkan peneguhan. Di sinilah kekuatan paradigma kerajaan tampak: ia menyediakan stabilitas teologis bagi pembacaan Alkitab, sambil sekaligus memanggil umat untuk bergerak menghidupi keadilan dan kesetiaan sebagai tanda kehadiran pemerintahan Allah, dan memberi kesaksian tentang damai dan kebenaran yang akan ditegakkan penuh ketika YHWH diakui sebagai Raja atas seluruh bumi.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa Kerajaan Allah menjadi poros teologi Perjanjian Lama yang menyatukan keseluruhan narasinya. Kerajaan tidak berfungsi sebagai tema tambahan, melainkan sebagai struktur konseptual yang memayungi kisah penciptaan, sejarah umat, hukum, hikmat, dan nubuat. Dengan demikian, pembacaan PL memperoleh orientasi tunggal yang menjaga koherensi teologisnya sekaligus meneguhkan bahwa Allah dipahami sebagai Raja yang memerintah atas ciptaan dan sejarah. Penelitian ini juga memperlihatkan integrasi empat dimensi utama teologi kerajaan: dimensi ontologis (Allah sebagai Raja kosmik), dimensi perjanjian (pemerintahan yang dioperasikan melalui relasi Sinai dan janji takhta), dimensi etis (keadilan-kesetiaan sebagai tumpuan takhta), dan dimensi eskatologis (visi pemerintahan universal-kekal). Keempat dimensi ini tidak berdiri terpisah, tetapi membentuk satu arsitektur teologis yang saling menopang: perjanjian menata relasi, etika mengisi karakter pemerintahan, dan eskatologi mengarahkan sejarah menuju puncak damai ilahi. Dengan demikian, teologi Kerajaan Allah dalam PL tampil sebagai kerangka hidup yang membentuk identitas umat, bukan sekadar konstruksi konseptual. Selanjutnya, penelitian ini menegaskan kesinambungan natural antara teologi kerajaan PL dan pewartaan Yesus dalam Perjanjian Baru. Deklarasi “Kerajaan Allah sudah dekat” (Mrk 1:15) berdiri di atas fondasi yang telah dibangun oleh PL, sehingga PB tidak memulai gagasan baru, tetapi menggenapi struktur teologis yang

sebelumnya telah dikembangkan melalui penciptaan, perjanjian, etika kerajaan, dan visi eskatologis. Dengan demikian, PL dan PB membentuk satu garis naratif yang utuh, di mana kerajaan Allah menjadi benang merah yang menghubungkan kedua perjanjian tersebut. Kontribusi penelitian ini bagi kajian teologi PL terletak pada penyusunan kerangka integratif yang menghubungkan empat dimensi teologi kerajaan dalam satu struktur koheren. Pendekatan ini memperkaya literatur yang umumnya membahas aspek kerajaan secara terpisah-pisah, dan memberikan perspektif baru bahwa kerajaan Allah dapat menjadi paradigma hermeneutik untuk membaca PL dan PB secara bersatu. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut, terutama mengenai hubungan antara Kerajaan Allah dan tema-tema seperti hikmat, ibadah, teologi kota, maupun etika sosial Israel kuno. Implikasi praktisnya mencakup penguatan spiritualitas kerajaan dalam kehidupan gereja, terutama dalam hal keadilan, kesetiaan, dan kesaksian publik sebagai bentuk partisipasi umat dalam pemerintahan Allah yang telah hadir dan akan disempurnakan.

Daftar Pustaka

- Ademiluka, S. O. (2017). Justice and Righteousness on Old Testament Prophets in Relation to Insecurity in Nigeria. *Journal for Semitics*, 26(1), 294–316.
- Brueggemann, W. (1991). The Kingship of God and the Shaping of Israel's Imagination. *Interpretation*, 45(4), 355–367.
- Coetsee, A. J. (2019). YHWH and Israel in Terms of the Concept of Life in Deuteronomy 1. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 32(1), 101–126.
- Ferguson, A. (2020). Isaiah 11: As Predictive Messianic Prophecy. *Presbyterion: Covenant Seminary Review*, 46(1), 75–89.
- Gerstenberger, E. S. (1971). "World Dominion" in Yahweh Kingship Psalms: Down to the Roots of Globalizing Concepts and Strategies. *Journal of Biblical Literature*, 90(3), 313–327.
- Gidion. (2017). Studi Biblika tentang Kerajaan Allah di Bumi. *Shift Key: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 7(1).
- Goldsworthy, G. (1991). The Kingdom of God as Hermeneutic Grid. In *Gospel and Kingdom: A Christian Interpretation of the Old Testament* (pp. 47–65).
- Hamilton, M. W. (2023). Narrating YHWH's Kingship in Psalms. *Kairos: Evangelical Journal of Theology*, 17(2), 135–147.
- Hwang, J. (2023). The King Whom Yahweh Your God Chooses: Deuteronomic Kingship in a World of Sacral Kingship. *Horizons in Biblical Theology*, 45(2), 169–191.
- Ko, G. (2018). 2 Samuel 21–24: A Theological Reflection on Israel's Kingship. *Old Testament Essays*, 31(1), 114–134.
- Kobstan, H. B., & Tjitojo, E. (2024). Menerapkan Prinsip Kerajaan Allah dalam Kehidupan Sehari-Hari: Pendekatan Konstruktif untuk Transformasi Spiritual dan Sosial. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 9(2).
- Lukmono, I. B., & Praditya, Y. L. (2025). Paradigma Nabi Yehezkiel terhadap Social Inequality Leadership dalam Konteks Gereja di Indonesia. *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika*, 7(2).
- Manurung, K. (2021). Memaknai Ajaran Alkitab tentang Keadilan Allah dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta. *Jurnal Teologi dan Musik Gereja*, 1(1).
- Mendrofa, F. A. (2022). Mempertemukan Perjanjian Sinai kepada Masyarakat Gereja. *Jurnal Tabgha*, 3(1).
- Menn, J. (2013). *Biblical Eschatology*. Resource Publications.
- Miller, P. D. (1984). God the King: The Sovereignty of God in the Old Testament. *Interpretation*, 38(1), 43–55.

- Mite, A. (2024). Gereja Memperjuangkan Keadilan dalam Kajian “Theory of Justice” John Rawls. *Proceedings of the National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, 2(1), 301–321.
- Panggarra, R. (2013). Kerajaan Allah menurut Injil-Injil Sinoptik. *Jurnal Jaffray*, 11(1).
- Panjaitan, F., & Olivia, R. A. (2023). Allah yang Memiliki Kesetaraan Sosial: Tafsir Amos 4:1–3. *Predica Verbum: Jurnal Teologi dan Misi*, 3(2), 84–97.
- Peels, H. G. L. (2001). The Kingdom of God in the Old Testament. *In Die Skriflig*, 35(2), 173–189.
- Rangin, L. T., Enok, J. K., Pembriani, S., & Sarmauli. (2025). Perkembangan Kerajaan Allah Zaman Paulus. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 3(2), 134–142.
- Selman, M. J. (1989). The Kingdom of God in the Old Testament. *Tyndale Bulletin*, 40(2).
- Shaw, D. M. (2018). *The Already and Not-Yet Kingdom*. The Gospel Coalition.
- Siahaan, B. I., Silaban, L. A., & Simanjorang, D. S. (2022). Konsep Teologis Perjanjian Lama tentang Kasih dan Keadilan (Pengalaman Iman Rut). *Areopagus: Jurnal Pendidikan dan Teologi Kristen*, 20(2), 158–171.
- Sihombing, R., Sitompul, S. R., & Sijabat, L. M. (2023). Konsep Teologi Perjanjian Lama tentang Kasih dan Keadilan. *Areopagus: Jurnal Pendidikan dan Teologi Kristen*, 21(1).
- Situmorang, K., & Marulitua, D. (2002). Kedaulatan Allah dalam Misi-Nya. *Jurnal Teologi Rahmat*, 8(1).
- Stewart, J. J. (2002). King of Kings: The Enthronement of Yahweh. *Studia Antiqua*, 2(1).
- Umaru, V. (2025). Healing and Covenant in Exodus 15:26 and Its Relevance to Contemporary Christian Health and Wellness. *Biblical Studies Journal*, 7(1), 52–77.
- Waoma, A., & Moimau, A. L. (2024). Sifat Penghakiman dalam Kehidupan Kristen: Menemukan Keseimbangan antara Keadilan dan Kasih. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, 2(3), 114–122.